

Revitalisasi Peraturan Daerah (PERDA) bagi Pelaku Bisnis dalam Membangun Jejaring Bisnis

*Johny Rusdiyanto
Fakultas Ekonomi
Universitas Surabaya*

ABSTRACT

The encouragement of Indonesian business peoples to enlarge it's market share will become realize as soon as their supply chain management system and business network availability have successfully find widerly of their potential geographic area as a new market. The existence of "Undang-Undang Otonomi Daerah" in 1999 give impact to local government to have a formal authority as a autonomy to create their own local regulation (Peraturan Daerah – PERDA). Looking to empirical experience these PERDA in several Kabupaten or Kotamadya, especially concern close to tax and retribution regulation, in reality increase their production costs and expenses. So, this condition will increase their network distribution cost. They have to think more and more before they make decision to announce some cooperation or partnership contract with other entities whom directly and place in the same network line . The local Government should become as a facilitator and have routine activity schedule to evaluate and make some revise to all existing PERDA as their revitalization effort to meet the ideal business condition of some firms and government institution. The can use the popular method that usually called Regulatory Impact Assessment (RIA). There are many constraint felt by a lot of business people in Indonesia related with the existence of some PERDA in Kabupaten or Kotamadya because these PERDA was announce and more advantages to local Government and not for Business people.

Keywords: Networking, Supply Chain management, Regulatory Impact Assessment, Local Regulation and Local Government

PENDAHULUAN

Dasar Pemikiran

Secara umum, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan Negara penghasil komoditas sumberdaya alam yang berpotensi dan berlimpah belum dapat dioptimalkan akibat lemahnya dukungan teknologi jejaring bisnis dan manajemen pengelolaan daerah, khususnya berkait dengan keputusan Peraturan daerah (Perda) yang dirasakan belum mampu memberikan iklim positif dan kondusif bagi beberapa pelaku bisnis di beberapa kabupaten dan kotamadya di Indonesia.

Beberapa Perda khususnya yang berkait dengan pajak daerah, dalam kenyataannya justru memberikan tekanan dan pembatasan sehingga aktivitas bisnis menjadi tersendat, akibat perda yang bersangkutan berpotensi memberikan tambahan biaya produksi dan distribusi. Semisal tarikan restribusi yang ditetapkan masing-masing kabupaten secara otomatis meningkatkan biaya distribusi manakala jalur distribusi barang harus melalui lebih dari satu kabupaten dalam pengangkutan barang ke distributor atau pengecer sebagai bagian dari alur rantai pasok dari produsen ke konsumen akhir.